

PERANAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI BERBASIS PEMANFAATAN MANAJEMEN BAGI USAHA KECIL DAN MENEGAH

Oleh :
Y. Djoko Suseno

Abstrak, berbagai permasalahan akan dihadapi oleh industri kecil dan menengah guna meningkatkan kinerja usahanya. Berbagai cara dan teknik bias dilakukan guna pengembangan usahanya terutama diabad modern ini. Salah satu teknologi yang sudah diakui dunia yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan akan membangun kehandalan suatu usaha. Sebagai upaya guna meningkatkan kinerja UKM dengan penerapan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Beberapa factor penyebab kegagalan UKM yaitu (1) ketidakmampuan manajemen, (2) kurang pengalaman, (3) lemahnya kendali keuangan, (4) gagal mengembangkan perencanaan strategic, (5) pertumbuhan tak terkendali, (6) lokasi yang buruk. Selain itu kegagalan mengelola manajemen UKM juga disebabkan karena kurang mampu dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi. Lalu kita sebelum mampu mengembangkan kinerja UKM harus disadari dulu criteria penilaian yang digunakan. Salah satunya yaitu dengan Balance Scor Card (BSC). Pada pola ini terdapat empat konsep yang dijadikan landasan pengukuran kinerja yaitu : masalah finansial, masalah internal, inovasi dan konsumen. Dari skala pengukuran kinerja lewat BSC yang secara tidak langsung telah menerapkan teknologi, lalu dilanjutkan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis manajemen, sehingga kinerja UKM dapat ditingkatkan pada posisi yang lebih baik dan handal.

Kata Kunci : Teknologi Informasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

PENDAHULUAN

Akibat krisis ekonomi yang mendera bangsa Indonesia sejak tahun 1998 silam, jumlah penduduk yang miskin di Indonesia semakin meningkat. Penduduk miskin, Penduduk miskin tersebut biasanya terdapat di kota dan yang paling besar tinggal di daerah pedesaan. Menurut data dari Bappenas bahwa jumlah pengangguran akan

Y. Djoko Suseno adalah Dosen Universitas Slamet Riyadi Solo

meningkat dari 8,9 persen menjadi 9,7 persen pada tahun 2004. Ini berarti apabila masalah pengangguran tidak terselesaikan maka akan dapat menambah jumlah penduduk miskin. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu permasalahan yang membelenggu dan merintang laju pertumbuhan ekonomi haruslah segera diselesaikan.

Salah satu indikator yang disinyalir dapat membantu pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah masuknya investasi asing dan investasi lokal. Harus diakui bahwa investasi asing mempunyai peran yang cukup penting, oleh karena itu pemerintah telah merancang pemberian pembebasan pajak (tax holiday) bagi perusahaan yang akan melakukan investasi di Indonesia.

Walaupun investasi asing tersebut berperan cukup penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak dapat dikesampingkan juga peran investasi lokal yang memiliki usaha skala kecil, yaitu usaha kecil dan menengah (UKM) juga tidak boleh diabaikan karena walaupun hanya kecil dan bersifat non-formal, tetapi justru usaha kecil menengah tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak yang berarti ikut berperan di dalam mengurangi masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu dalam tulisan yang singkat ini akan dibahas bagaimana sebaiknya mengembangkan UKM dimasa yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

Peranan Penting Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menurut undang-undang perbankan UUP yaitu berdasarkan UU No 7 tahun 1992 dan diubah dengan UU no 10 tahun 1998 dikatakan bahwa di Indonesia terdapat jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan (BPR). Bank umum terdiri bank konvensional dan bank syariah sedangkan BPR terdiri dari BPR konvensional dan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian kredit bank yang bersifat umum tersebut disalurkan kepada pengusaha besar atau konglomerat dan sebagian kecil saja yang disediakan dan dimanfaatkan untuk para pengusaha kecil. BPR sebagai bank yang berfungsi untuk mendorong pendanaan bagi pengusaha kecil yang masih jauh dari cukup untuk membiayai usaha kecil tersebut. Cukup adil rasanya apabila kepemilikan Negara pada sebuah bank digunakan untuk melayani dan membiayai kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah. Sebab peran penting dan strategi usaha kecil bagi perekonomian di Negara kita cukuplah penting. Dari jumlah jenis usaha, kesempatan kerja, aspek produksi dan peranan kontribusi terhadap pemulihan akibat dampak krisis ekonomi, peranan usaha kecil sangatlah besar. Walaupun belum menunjukkan keberhasilan yang memuaskan, tetapi ini merupakan langkah awal yang bagus dan perlu didukung oleh semua pihak.

Sebenarnya terdapat cukup banyak program yang dilakukan oleh berbagai instansi yang mengatas namakan untuk pengembangan usaha kecil. Namun sayangnya dilain sisi upaya pengembangan usaha kecil ternyata masih belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, tetapi cenderung diabaikan dan hanya dipandang dengan sebelah mata. Kemungkinan program-program pengemabnagan belum dirancang dengan sungguh-sungguh, mengabaikan strategi, serta ukuran kinerja yang tidak jelas sehingga dampak dari pengelolaan yang terkesan asal-asalan tersebut belumlah menghasilkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang masih minim atau kalau tidak mau dikatakan gagap teknologi tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja usaha kecil dan menengah.

Kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia dinyatakan secara ekplisit di dalam garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 Pedoman kebijaksanaan Negara ini menggaris bawahi 28 butir mengenai arah kebijaksanaan

pembangunan ekonomi nasional untuk periode tahun 1999-2004 kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari dua kebijaksanaan utama (Monogkop & UKM, 2000 dalam Tambunan, 2002. Faktor Keberhasilan dan kegagalan usaha kecil Menurut Zimmerman & Scarborough (2002) menyebutkan beberapa faktor penyebab kegagalan usaha kecil antara lain (1) ketidak mampuan manajemen, (2) kurang pengalaman (3) lemahnya kendali keuangan (4) gagal mengorganiskan perencanaan strategis (5) pertumbuhan tak terkendali (6) lokasi yang buruk (7) pengendalian persediaan yang tidak baik dan (8) ketidak mampuan membuat transisi kewirausahaan.

Kriteria keberhasilan usaha kecil diungkapkan oleh peneliti Ghose et al (dalam meng & Liang, 1996) tentang wirausahaan kecil di Singapura menunjukkan bahwa dari 82% responden menjawab 70% wirausaha menggunakan net profit growth untuk mengukur keberhasilan. Disusul laba penjualan 61% laba setelah pajak Selanjutnya 38 % dari wirausaha yang menggunakan kriteria keberhasilan laba bersih net profit growth)

Selanjutnya kegagalan mengelola manajemen UKM sehingga karena kurang mampu untuk memanfaatkan kemajuan teknologi maka juga akan membawa dampak yang tidak kecil terhadap kemajuan usaha kecil apalagi pada tahun 2004 bahwa kran sudah dibuka menunjukkan perdagangan bebas tingkat ASIA atau AFTA sudah dibuka lebar-lebar, sehingga perusahaan yang sudah siap menghadapi kompetisi yang sangat ketat saja yang akan mampu untuk bertahan.

Belajar dari pengalaman bahwa untuk memajukan dan mengembangkan usaha kecil haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan segala kemampuan yang optimal dan tidak boleh setengah-setengah. Oleh karena itu sangat dimungkinkan dan perlu ditinjau kembali fungsi bank yang belum berperan secara maksimal di dalam membantu kesulitan pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan untuk usahanya. Sebab selama ini terkasih bahwa yang menjadi masalah dan mempek bagi pengusaha kecil adalah sulitnya mendapat dana segar atau kredit untuk pembiayaan usahanya kalau tidak mau dikatakan prosedur yang harus dihadapi oleh pengusaha kecil tersebut cenderung berbelit-belit. Sangat masuk akal rasanya jika pemerintah Negara atau sebuah bank digunakan untuk melayani dan membiayai kegiatan ekonomi usaha kecil

Maka sangat jelas ini berbanding terbalik dengan pengusaha besar atau sekilas konlomerat yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pelayanan dan kemudahan di dalam pembiayaan usahanya. Sehingga perlu bagi pemerintah untuk membuat semacam aturan atau undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat untuk penunjukan atau pendirian bank yang berfungsi secara khusus untuk melayani kepentingan para pengusaha kecil dan menengah akan tetapi apabila kondisi tersebut belum dimungkinkan atau sulit untuk dilakukan maka cara yang lebih dapat diterima dengan akal sehat adalah mengoptimalkan peran dan fungsi perbankan yang sudah ada untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah tersebut dengan sungguh-sungguh dengan itikad yang baik dan bertanggung jawab

Sedangkan peran pemerintah di samping telah memberikan bantuan atau memfasilitasi pengadaan perbankan adalah perlu ditunjuk sebuah lembaga yang dibutuhkan pemerintah yang bertugas memajukan pengembangan usaha kecil dan menengah tersebut, tentunya lembaga-lembaga tersebut dikelola oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya.

Oleh karena itu perlu kesungguhannya hai agar misi tersebut dapat berjalan dengan baik yaitu dengan cara :

1. Harus ada jaminan dan kepastian dalam pemberian dan pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan sehingga akan mengurangi resiko pihak perbankan apabila pengusaha kecil dan menengah tidak dapat mengembangkan pinjaman jaminan yang harus dijaminan untuk bank yang bersangkutan.

2. Memberikan bantuan pembiayaan bagi perusahaan kecil yang potensi atau prospektif yang belum sempat dilirik oleh perbankan, sehingga usaha kecil tersebut dapat lebih berkembang dan lebih maju.
3. Memberi bantuan secara teknik/transfer teknologi kepada pengusaha kecil dan menengah dengan cara memberi penyuluhan, pelatihan di bidang produksi, pemasaran, keuangan & teknologi sehingga kinerja unit usaha kecil dan menengah dapat lebih meningkat.

Dengan strategi terpadu diharapkan pelayanan kepada usaha kecil dan menengah dalam pemberian kredit diharapkan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Namun tampaknya tidak mudah untuk mewujudkan impian tersebut. Sebab di dalam persaingan yang sangat kompetitif ini banyak usaha kecil dan menengah yang harus bersaing dengan usaha besar.

Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh usaha kecil dan menengah, sebab untuk menjalankan strategi tersebut biasanya dibutuhkan sumber dana dan daya yang tidak sedikit, celakanya sumber tersebut hanya dimiliki oleh usaha yang berskala besar. Oleh sebab itu dalam suatu persaingan biasanya pihak usaha kecil dan menengah selalu berada pada pihak yang kurang diuntungkan.

Menurut Lee Khai Sheng (2002) terdapat empat alternative strategi untuk menghadapi persaingan dengan usaha besar yaitu pertama, strategi ceruk pasar (*nitching strategy*) yaitu usaha memasuki pasar yang belum dikuasai secara mantap oleh perusahaan besar dengan cara diferensiasi produk yang terdiri dari peningkatan mutu produk, memberikan pelayanan prima jual, pemberian kartu garansi dan sebagainya. Kedua strategi substitusi (*subitisi strategy*) dan ketiga strategi bebas meluncur (*free-riding strategy*) kedua strategi ini bertujuan agar usaha besar terus mengakomodasi masuknya usaha kecil dan menengah tersebut dengan jalan memproduksi barang yang sejenis dengan usaha besar dan berusaha menurunkan harga jual untuk menarik minat konsumen terhadap barang-barang yang diproduksi oleh usaha kecil dan menengah. Namun apabila usaha besar secara maksimal dan sangat kuat melawan usaha kecil dan menengah di pasar yang telah dikuasai secara mantap maka strategi yang digunakan oleh usaha kecil dan menengah adalah menggunakan strategi penghindaran (*defence strategy*) agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar maka usaha yang diutamakan adalah untuk mencari pasar yang lain atau bergabung dengan usaha besar.

PEMBAHASAN

Bagaimana Meningkatkan Kinerja Unit Usaha dan Menengah dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi?

Kendala peningkatan kinerja unit usaha kecil dan menengah sering menjadi suatu masalah. Bagaimanapun karyawan memiliki kontribusi yang sangat penting di dalam pengelolaan sebuah unit usaha. Agar suatu unit usaha dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang maka unit usaha tersebut perlu alat ukur untuk menyatakan apakah kinerja unit usaha yang dipimpinya baik ataukah jelek. Oleh karena ini adalah suatu kewajiban top manager untuk meningkatkan unit usaha yang dipimpinya. Salah satu metode untuk mengukur kinerja unit usaha/perusahaan adalah metode *Balance Score Card* (BSC).

Menurut Kaplan dan Norton (1996) dikatakan bahwa BSC merupakan pusat dari semua proses manajemen sebuah unit usaha/perusahaan. BSC juga mengintegrasikan perspektif-perspektif internal dan eksternal unit usaha/perusahaan yang akan menjadi landasan pengukuran kinerja unit usaha/perusahaan secara menyeluruh.

Terdapat empat konsep BSC yang dapat dijadikan sebagai landasan pengukuran kinerja perusahaan yaitu masalah finansial, masalah internal, inovasi dan konsumen.

Walaupun memiliki parameter-parameter tersendiri untuk mengukur bahwa kinerja unit usaha atau perusahaan itu baik atau jelek pada dasarnya adalah berifat dinamis yang berarti dapat berubah sesuai dengan kondisi unit usaha/perusahaan tersebut.

Pada dasarnya ini konsep BSC adalah pemahaman kepada seluruh karyawan unit usaha/perusahaan bahwa setiap kerja yang mereka lakukan akan berpengaruh terhadap kinerja unit usaha/perusahaan terhadap kinerja yang dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya BSC diharapkan sebagai suatu alat untuk mengubah perilaku seluruh sumber daya perusahaan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak dapat dipungkiri memang persoalan kinerja seringkali menjadi momok atau kendala pada sektor usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja tersebut. Salah satu pemanfaatan teknologi tersebut adalah penggunaan teknologi berbasis informasi (IT).

Di era yang serba canggih ini penggunaan teknologi informasi sudah merasuk ke berbagai sektor kehidupan manusia. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah teknologi informasi maka tercipta teknologi canggih yang bernama mikroprocessor dan berlanjut dengan penggunaan teknologi internet maka dapat disimpulkan bahwa dunia sekarang adalah tiada batas antara Negara satu dengan Negara lain. Dan salah satu penerobosan ipak tersebut adalah penggunaan IT di bidang bisnis. Sehingga diharapkan dengan adanya pemanfaatan IT ini dapat mendorong peningkatan kinerja unit usaha kecil dan menengah. Seperti di sampaikan di atas bahwa peranan UKM merupakan salah satu pelaku unit usaha yang cukup strategis bagi perekonomian di Indonesia, namun mengapa unit-unit usaha tersebut tidak dapat mengangkat perekonomian di Indonesia dari keterpurukan?

Kemungkinan hal itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah produk yang dihasilkan oleh unit usaha kecil dan menengah tersebut merupakan produk yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal, masih sedikitnya unit usaha kecil dan menengah untuk mengolah produk yang mempunyai nilai tambah (value added) yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan kurang memiliki keunggulan yang bersifat kompetitif. Selain itu daya serap dan pemanfaatan ipak di Indonesia umumnya dan unit usaha kecil dan menengah pada khususnya masih sangat kecil. Tentu hal ini semakin memperburuk citra UKM di Indonesia baik segi manajemen usaha dan peningkatan citra kerja. Padahal banyak pihak meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mendorong peningkatan kinerja unit kegiatan kecil dan menengah.

Di samping itu lingkungan eksternal juga dapat menyebabkan terjadinya hambatan bagi UKM, misalnya undang-undang perbankan yang sering mengabaikan kepentingan pemberian kredit bagi usaha kecil dan menengah. Yang akhirnya hanya menjadi alat kepentingan perusahaan yang berkala besar/konglomerasi saja. Untuk mendapatkan modal pembiayaan dari bank yang bersangkutan tentu tidaklah mudah karena salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh UKM adalah adanya jaminan aset yang tidak kecil untuk mendapatkan dana segar tersebut, padahal disini yang lain bank tersebut perlu jaminan bahu uang yang dipinjarkan harus ada yang menjamin dapat kembali, untuk itu peranan pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan oleh UKM untuk mendapatkan dana tersebut hal ini lebih penting lagi adalah rendahnya akses UKM kepada pasar sebagai akibat belum adanya kemampuan penguasaan teknologi yang berbasis informal, pad hal dalam ilmu bisnis dikatakan siapa yang menguasai informasi sesungguhnya ia telah memenangkan satu langkah pesaing yang memiliki informasi tetapi sedikit, bagaimana dengan UKM kalau tidak menguasai teknologi yang berbasis informasi?

Walaupun memiliki kelemahan tetapi sesungguhnya UKM juga memiliki keunggulan yang tidak dapat dipandang sebelah mata salah satunya adalah pengadaan bahan baku untuk produksi tidak bergantung pada impor dari luar negeri sehingga ketika terjadi penurunan nilai mata uang rupiah terhadap nilai dollar maka UKM tidak akan kelabakan karena kebutuhan tersebut dipenuhi oleh supplier dari dalam sehingga UKM

teknologi tersebut adalah penggunaan teknologi berbasis informasi (IT). Di era yang serba canggih ini penggunaan teknologi informasi sudah merasuk ke berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan iptek tersebut adalah penggunaan IT di bidang bisnis.

Karena penggunaan teknologi berbasis informasi merupakan langkah penting bagi para pengelola UKM maka peningkatan skill dan pemahaman terhadap IT bagi para pengambil keputusan unit usaha kecil dan menengah. Dukungan dan peran pemerintah terhadap penggunaan IT bagi UKM sangatlah diperlukan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dan pemberdayaan UKM perlu adanya kerja sama dan dukungan semua pihak secara berkesinambungan, agar UKM dapat bersaing dengan perusahaan berskala besar sehingga di dalam menghadapi pasar bebas di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Berry, Albert Rodriguez, Edgard, & Sandee, Henry, 2001. *Firm and Group Dynamics in the small and medium Enterprise (SMEs) in Indonesia*, World bank Institute, 1-25.
- Fulop, Lis 2000. *Study of Government Funded Small Business network in Australia*, *Journal of small Business Management*, Oct 87-92.
- Hanna, N., Boyson, S., Gunaratne, S" *The East Asian Miracle and Information Technology: Strategic Management of Technological Learning* Word bank Discussion Papers, The word bank Washington. D.C., 1996.
- Kaplan, Robert S, David P Norton. *The Balance Scorecard Measures That Drive Performance*. Harvard Business Review, Jan-Feb. 1996.
- King, J.I., Gurbaxani V., Kraemer, L.K., Mc Parlan, W. T., Ramon, S.K Yap,S.C. 1994. *Institutional factors in information technology innovation*, *Information System Research*, VI. 5., No 2 June, 1994.
- Lee Khai Sheng (2002). " *Competing for Market*". *Growth Strategies for SMEs*.
- Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992.

masih tetap dapat memproduksi relative stabil. Sementara dengan pemberian kredit kepada UKM ternyata juga dapat menggabungkan perbankan, kalau mau jujur ternyata UKM lebih disiplin dan patuh pada aturan perbankan dalam melunasi kewajibannya/kreditnya dibandingkan dengan perusahaan berkala besar/konglomerat. Dalam kasus banyak konglomerat yang melarikan diri keluar negeri dengan membawa hutang bernilai trilyunan rupiah yang akhirnya menenggelamkan rakyat kecil saja. Sehingga dengan adanya penyediaan kredit kepada UKM yang tersebar di bumi nusantara ini sesungguhnya pihak perbankan telah melakukan penyebaran resiko, sehingga apabila salah satu UKM tidak dapat melunasi kewajibannya maka masih ratusan UKM yang masih jujur dan sanggup untuk melunasi kewajibannya tersebut.

Maka solusi yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan dan peningkatan kinerja UKM adalah adanya lebihnya nyata penggunaan IT agar dapat berdaya saing dengan perusahaan berkala besar dalam hal ini tentunya IT harus dapat digunakan sebagai alat yang dapat meningkatkan produktivitas kinerja dan memaksimalkan kemampuan (*profite*) bagi UKM. Oleh dalam memilih dan memanfaatkan IT haruslah sesuai sesuai dengan proses kegiatan dan prioritas usaha yang dijalankan. Beberapa faktor yang diduga mempunyai peranan penting dalam penyebaran IT salah satunya adalah dukungan dan peranan lembaga pemerintah (King et al., 1994)

Selanjutnya menurut King peran lembaga tersebut dalam hal ini adalah sebagai pemasok informasi tentang inovasi teknologi, pemegang otoritas regulasi, sebagai penyedia bantuan finansial, pelaksana riset dan pengembangan terpadu, dan pelindung bagi pemilik hak cipta. Sedangkan menurut Hanna et. al (1996) bahwa adanya intervensi pemerintah dalam penyebaran IT akan mendorong proses teknologi dan sekaligus memberikan rangsangan pengembangan strategi usaha di Negara-negara berkembang. Sementara itu Thong and Yap (1996) menemukan bahwa derajat pemahaman IT yang dimiliki oleh para top faktor-faktor yang tidak dapat diabaikan dalam penyebaran teknologi berbasis informasi tersebut.

Bagaimana UKM dengan kadar pemahaman teknologi mempunyai kemungkinan memanfaatkan IT secara ekstensif. Oleh karena itu penggunaan teknologi berbasis informasi merupakan langkah penting bagi para pengelola UKM dalam memasuki pasar bebas yang dimulai pada tahun 2003 (AFTA), maka peningkatan skill dan pemahaman terhadap IT bagi para pengambil keputusan/top manajer unit usaha kecil dan menengah adalah merupakan syarat mutlak untuk mencapai efisiensi dan efektifitas unit usaha kecil dan menengah.

Dukungan dan peran pemerintah terhadap penggunaan IT bagi UKM sangatlah diperlukan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Dalam hal ini dimungkinkan untuk bekerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan UKM tersebut misalnya dengan mengembangkan UKM berbasis teknologi tepat guna sehingga diharapkan akan membawa perubahan kearah yang lebih maju khususnya sumber daya manusia (pengelola) unit usaha tersebut. Bahkan jika dimungkinkan dapat mendirikan warung informasi dan teknologi sehingga unit UKM dapat mengakses berbagai macam informasi yang akan dibutuhkan untuk pengembangan UKM tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dan pemberdayaan UKM perlu adanya kerja sama dan dukungan semua pihak secara berkesinambungan, agar sekarang dan dimasa akan datang UKM dapat bersaing dengan perusahaan skala besar/konglomerat sehingga di dalam menghadapi pasar bebas yang sudah berjaln di awal tahun ini UKM benar-benar sudah siap menghadapinya.

PENUTUP

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja unit usaha kecil dan menengah. Salah satu permasalahan